



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto-Jakarta 10270

Nomor : PW/11558 /DPR RI/IX/2020
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Penugasan untuk Membahas RUU

24 September 2020

Yth. Pimpinan Komisi VI DPR RI
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020, telah membicarakan surat masuk dari Presiden RI Nomor: R-36/Pres/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020, hal: Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA).

Dengan memperhatikan pendapat Ketua Fraksi dan Ketua Alat Kelengkapan Dewan, sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah menyetujui Pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut **diserahkan kepada Komisi VI DPR RI** dan apabila pembahasan telah selesai, maka diharapkan untuk segera memberikan laporan kepada Pimpinan DPR RI.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam,

M. Azis Syamsuddin

Tembusan:

1. Pimpinan DPR RI;
2. Sekretaris Jenderal DPR RI;
3. Deputi Bidang Persidangan;
4. Plt. Deputi Bidang Administrasi;
5. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan;
6. Kepala Biro Persidangan I;
7. Kepala Bagian Set. Komisi VI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Agustus 2020

Nomor : R-36/Pres/08/2020
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara *EFTA*)

Kepada Yth.

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

di

Jakarta

Dengan ini kami menyampaikan :

--- **Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara *EFTA*)** --- untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, guna mendapatkan persetujuan.

Selanjutnya, untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut, kami menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Menteri Perdagangan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili kami dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Tembusan:

1. Wakil Presiden
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Luar Negeri
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Menteri Perdagangan